



Upaya Pencegahan Konflik Antar Kelompok Kedaerahan Dalam Meningkatkan Keamanan Di Rutan Kelas 1 Palembang

Bintang Eriatama Putera¹⁾, Lauditta Indah Dewi²⁾

Politeknik Ilmu Pemasarakatan, Jawa Barat, Indonesia

bintangputraep97@gmail.com¹⁾

indahdewi.lauditta@gmail.com²⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi upaya pencegahan konflik antar kelompok kedaerahan di Rutan Kelas 1 Palembang untuk meningkatkan keamanan. Penyebab konflik meliputi persaingan sumber daya, ketidakadilan distribusi fasilitas, perbedaan budaya dan etnis, serta dinamika politik internal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif. Lingkungan rutan yang tertekan dan kurangnya program resolusi konflik turut memperburuk situasi. Pencegahan konflik memerlukan penguatan sistem keamanan, pemberdayaan narapidana melalui program rehabilitasi dan pendidikan, peningkatan kualitas petugas rutan, serta kolaborasi dengan pihak eksternal seperti pemerintah daerah dan LSM. Pendekatan sensitif terhadap budaya dan kebijakan internal yang adil juga diperlukan. Dengan evaluasi berkala, diharapkan tercipta lingkungan yang aman dan rehabilitatif di Rutan Kelas 1 Palembang.

Kata kunci: Konflik antarkelompok, pencegahan konflik, keamanan.

Abstract

This study aims to identify efforts to prevent inter-regional group conflicts at Class 1 Detention Center Palembang to enhance security. The causes of conflict include resource competition, unfair distribution of facilities, cultural and ethnic differences, and internal political dynamics. The method used in this research is qualitative. The stressful environment of the detention center and the lack of conflict resolution programs further exacerbate the situation. Conflict prevention requires strengthening the security system, empowering inmates through rehabilitation and education programs, improving the quality of detention center staff, and collaborating with external parties such as local government and NGOs. A culturally sensitive approach and fair internal policies are also needed. With regular evaluation, it is expected that a safe and rehabilitative environment will be created at Class 1 Detention Center Palembang.

Key words: Inter-group conflict, conflict prevention, security.

PENDAHULUAN

Keanekaragaman adalah bagian penting dari kekayaan dan identitas Indonesia. Meskipun begitu, keragaman, seperti keragaman etnis dan budaya, juga dapat menantang kesatuan bangsa. Konflik dapat terjadi karena perbedaan yang ditimbulkan oleh keragaman. Kesadaran multikultural adalah cara untuk menghadapi keragaman ini (Uci Zahrafi, 2017). Pendidikan adalah cara terbaik untuk menumbuhkan kesadaran multikultural ini (Adibah, 2014). Pendidikan sangat penting untuk membentuk karakter bangsa, terutama karakter Pancasila, yang mendorong kesatuan dan kesadaran multikultural.

Dalam kehidupan dan memenuhi kebutuhan mereka, manusia terikat dengan orang lain (Mustar dkk., 2020). Interaksi sosial dalam kelompok mendorong terbentuknya identitas yang

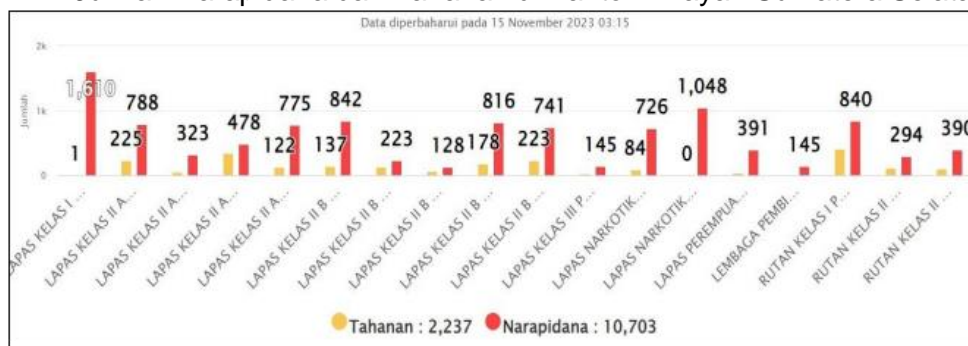
mempromosikan kesamaan budaya dan nilai-nilai hidup. Identitas ini menghasilkan rasa keterikatan atau solidaritas karena individu merasakan kesamaan. Untuk mencapai kenyamanan hidup, manusia cenderung bergabung dengan kelompok yang sesuai dengan identitas mereka (Nur Hidayat, 2017).

Fenomena ini terlihat dalam pembentukan komunitas seperti paguyuban (*Gemeinschaft by place*), di mana orang-orang dikelompokkan berdasarkan asal daerah atau kesamaan tempat tinggal. Contohnya terlihat dalam lingkungan pendidikan tinggi, di mana organisasi mahasiswa daerah atau organda terbentuk berdasarkan asal atau tempat tinggal mereka. Organda mahasiswa ini merupakan persekutuan mahasiswa dari wilayah perantauan yang berasal dari daerah yang sama. Selain fungsi sebagai komunitas paguyuban yang memperkuat aspek sosial dan memelihara nilai budaya daerah di tengah modernisasi kampus, organda ini juga sering digunakan sebagai wadah bagi mahasiswa dari daerah untuk berdialog dan berupaya memajukan daerah mereka melalui pendidikan (Hutagaol dkk, 2022).

Indonesia, sebagai negara kepulauan yang kaya akan keberagaman budaya, suku, dan agama, memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga keharmonisan di antara berbagai kelompok masyarakatnya. Keberagaman yang merupakan kekayaan bangsa ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan potensi konflik, terutama di lingkungan-lingkungan yang memiliki keterbatasan ruang dan sumber daya, seperti di Rumah Tahanan (Rutan). Rutan Kelas 1 Palembang, sebagai salah satu institusi pemasyarakatan di Indonesia, tidak luput dari tantangan ini. Konflik antar kelompok kedaerahan di dalam rutan bisa menjadi ancaman serius bagi keamanan dan kestabilan lingkungan rutan, serta menghambat proses rehabilitasi para tahanan.

Rutan Kelas 1 Palembang merupakan salah satu institusi pemasyarakatan di Indonesia yang bertugas untuk menampung dan mengelola tahanan yang sedang menjalani proses hukum. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Rutan Kelas 1 Palembang adalah tingginya potensi konflik antar kelompok kedaerahan di dalam lingkungan tahanan. Konflik antar kelompok ini seringkali berakar dari perbedaan budaya, suku, dan latar belakang sosial yang dibawa oleh para tahanan. Konflik semacam ini tidak hanya mengancam stabilitas dan keamanan di dalam rutan, tetapi juga dapat mempengaruhi proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang seharusnya dijalani oleh para tahanan.

Gambar 1
Jumlah Narapidana dan Tahanan di Kantor Wilayah Sumatera Selatan



Sumber: Sada Kemenkumham (2023)

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada Gambar 1, terlihat bahwa Rutan Kelas 1 Palembang menduduki posisi kedua terbanyak setelah Lembaga Pemasyarakatan 1 Palembang dalam hal jumlah narapidana dan tahanan di Kantor Wilayah Sumatera Selatan, dengan 420 tahanan dan 840 narapidana. Data ini mengindikasikan bahwa Rutan Kelas 1 Palembang mengalami overkapasitas, karena kapasitas penampungannya hanya 750 tahanan. Tingkat overkapasitas di Rutan Kelas 1 Palembang mencapai 168%, menunjukkan kelebihan 68% dari kapasitas seharusnya.



Beberapa insiden di Lembaga Pemasyarakatan menunjukkan tingginya risiko konflik antarkelompok. Contohnya, kerusuhan di Rutan Kelas I Pakjo, Palembang, yang mengakibatkan dua tahanan meninggal dan beberapa lainnya terluka. Konflik ini diduga disebabkan oleh ketegangan antara narapidana dari kelompok kedaerahan yang berbeda. Insiden serupa juga terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Salemba, Jakarta Pusat, dengan keributan antara kelompok penghuni, khususnya antara kelompok Palembang dan kelompok Ambon.

Upaya pencegahan konflik antar kelompok kedaerahan di Rutan Kelas 1 Palembang menjadi semakin penting mengingat latar belakang para tahanan yang sangat beragam. Rutan ini menampung tahanan dari berbagai daerah di Indonesia dengan beragam suku, bahasa, dan budaya. Ketika para tahanan ini berinteraksi di dalam lingkungan yang terbatas dan penuh tekanan seperti rutan, perbedaan-perbedaan tersebut seringkali memicu ketegangan dan konflik. Situasi ini diperburuk oleh kurangnya kesadaran dan pemahaman akan pentingnya toleransi dan kerjasama antar kelompok. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk membahas "Apa saja penyebab yang dapat memicu terjadi konflik antar kelompok kedaerahan di Rutan Kelas 1 Palembang? Bagaimana Upaya pencegahan untuk mengatasi konflik kelompok kedaerahan dan meningkatkan keamanan di Rutan Kelas 1 Palembang?". Maka dari itu penulis mengangkat judul "Upaya Pencegahan Konflik Antar Kelompok Kedaerahan Dalam Meningkatkan Keamanan Di Rutan Kelas I Palembang". Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam merancang strategi pencegahan yang efektif yang dapat diterapkan di lembaga pemasyarakatan, dengan tujuan menciptakan lingkungan yang aman, tenteram, dan mendukung proses reintegrasi narapidana.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan eksploratif untuk mengidentifikasi dan menganalisis upaya pencegahan konflik antarkelompok kedaerahan dalam rangka meningkatkan keamanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas 1 Palembang. Pemilihan pendekatan kualitatif disebabkan oleh tujuan penelitian ini untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang bagaimana upaya pencegahan konflik antarkelompok kedaerahan diimplementasikan dan dampaknya terhadap keamanan di dalam lembaga tersebut (Sugiyono, 2012).

Peneliti kualitatif menganggap bahwa realitas merupakan hasil konstruksi ulang oleh individu yang terlibat dalam situasi sosial. Secara epistemologis, peneliti kuantitatif menunjukkan sikap independen dan menjaga jarak (*detachment*) terhadap realitas yang sedang diteliti. Di sisi lain, peneliti kualitatif aktif berinteraksi secara mendalam dengan realitas yang sedang diteliti. Dari segi retorika atau penggunaan bahasa, penelitian kuantitatif sering menggunakan bahasa formal dan impersonal dengan mengacu pada angka atau data statistik. Analisis data kualitatif akan dilakukan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang konteks implementasi upaya-upaya tersebut dan persepsi para pemangku kepentingan mengenai efektivitasnya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan pencegahan konflik antarkelompok kedaerahan dan peningkatan keamanan di lembaga pemasyarakatan, khususnya Rutan Kelas 1 Palembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Penyebab Terjadinya Konflik Antar Kelompok Kedaerahan di Rutan Kelas 1 Palembang

Konflik antar kelompok kedaerahan di Rutan Kelas 1 Palembang dapat dipicu oleh berbagai faktor kompleks yang melibatkan dinamika internal narapidana serta faktor eksternal yang mempengaruhi lingkungan penjara. Salah satu penyebab utama adalah persaingan yang intens untuk menguasai sumber daya yang terbatas, seperti ruang hunian, fasilitas, dan akses terhadap kegiatan atau kesempatan tertentu. Persaingan ini sering kali menciptakan ketegangan antar kelompok yang bersaing untuk mendapatkan keuntungan dan kenyamanan di dalam rutan.



Ketidakadilan dalam distribusi sumber daya juga menjadi pemicu konflik. Jika ada persepsi bahwa satu kelompok mendapatkan perlakuan atau fasilitas yang lebih baik dibandingkan kelompok lain, hal ini dapat memunculkan rasa ketidakpuasan dan ketegangan di antara narapidana. Kesenjangan sosial dan ekonomi antar kelompok juga dapat memperburuk kondisi ini, karena adanya perbedaan dalam hal status sosial, pendidikan, atau ekonomi yang menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan pengaruh di dalam rutan.

Selain itu, konflik juga bisa dipicu oleh perbedaan kultural dan etnis di antara kelompok-kelompok narapidana. Perbedaan ini mencakup bahasa, tradisi, dan nilai-nilai budaya yang berbeda, yang dalam lingkungan yang tertekan seperti rutan, dapat memperburuk ketegangan antar kelompok. Dinamika politik internal kelompok, termasuk ambisi politik atau perjuangan kekuasaan, juga dapat menjadi faktor pendorong konflik di dalam rutan.

Kondisi lingkungan yang tertekan di dalam rutan, seperti kelebihan kapasitas, kurangnya pengawasan yang memadai, atau kondisi infrastruktur yang buruk, juga berperan dalam menciptakan ketegangan di antara narapidana. Kurangnya program resolusi konflik yang efektif juga dapat memperburuk situasi, meningkatkan risiko terjadinya konfrontasi fisik antar kelompok.

Terakhir, pengaruh eksternal dari kelompok kriminal atau jaringan di luar rutan, serta interaksi dengan pengunjung atau mantan narapidana, juga dapat mempengaruhi dinamika internal dan memicu konflik. Dengan memahami berbagai faktor ini, pihak pengelola rutan dapat mengembangkan strategi yang holistik untuk mengelola konflik antarkelompok dengan lebih efektif, termasuk melalui peningkatan keamanan, pemberdayaan narapidana melalui rehabilitasi, dan promosi dialog antarkelompok yang konstruktif.

Upaya Pencegahan Untuk Mengatasi Konflik Kelompok Kedaerahan dan Meningkatkan Keamanan di Rutan Kelas 1 Palembang

Pencegahan konflik kelompok kedaerahan dan peningkatan keamanan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 1 Palembang memerlukan pendekatan yang komprehensif dan multidimensional. Mengingat kompleksitas dari permasalahan yang melibatkan latar belakang budaya, sosial, dan ekonomi dari para narapidana, upaya pencegahan harus melibatkan berbagai aspek yang saling terkait. Pendekatan ini meliputi penguatan sistem keamanan, pemberdayaan program rehabilitasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kolaborasi dengan pihak eksternal yang relevan.

Pertama, penguatan sistem keamanan di Rutan Kelas 1 Palembang adalah langkah fundamental dalam mencegah konflik kelompok kedaerahan. Penguatan ini dapat dilakukan melalui penambahan jumlah personel keamanan serta peningkatan kapasitas mereka dalam menangani situasi konflik. Pelatihan khusus mengenai manajemen konflik dan teknik de-eskalasi penting untuk diberikan kepada seluruh petugas. Selain itu, teknologi keamanan seperti CCTV, alarm, dan pengawasan elektronik lainnya harus dioptimalkan untuk memantau aktivitas narapidana dan mendeteksi potensi konflik sejak dini. Pengaturan zona yang jelas di dalam rutan juga diperlukan untuk memisahkan narapidana berdasarkan tingkat risiko dan potensi konflik, sehingga dapat meminimalisir kontak yang berpotensi memicu ketegangan.

Kedua, program rehabilitasi dan reintegrasi sosial perlu diperkuat dan diperluas cakupannya. Konflik seringkali muncul akibat ketidakpuasan dan ketidakpastian masa depan narapidana. Oleh karena itu, program-program yang memberikan keterampilan kerja, pendidikan, dan konseling psikologis sangat krusial. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya membantu narapidana dalam mengisi waktu selama masa hukuman, tetapi juga memberikan harapan dan tujuan yang lebih jelas setelah mereka bebas nanti. Pemberdayaan ini dapat mengurangi potensi konflik karena narapidana memiliki fokus dan aktivitas yang positif.

Ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia di Rutan Kelas 1 Palembang harus menjadi prioritas. Petugas rutan harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, empati, serta kemampuan memahami dinamika sosial dan budaya para narapidana. Rekrutmen dan pelatihan berkala untuk petugas sangat penting agar mereka dapat menjalankan tugas dengan profesionalisme tinggi. Selain itu, pengadaan tenaga ahli seperti psikolog dan konselor yang

memahami konflik sosial dan kultural juga dapat membantu dalam meredakan ketegangan dan memberikan solusi yang tepat pada permasalahan yang ada.

Selanjutnya, kolaborasi dengan pihak eksternal seperti pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah (LSM), serta komunitas lokal sangat diperlukan. Program-program intervensi berbasis komunitas dapat memainkan peran penting dalam mendukung upaya rehabilitasi narapidana. Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan dan anggaran yang memadai, sementara LSM dan komunitas lokal dapat terlibat dalam program-program pelatihan dan penyuluhan di dalam rutan. Partisipasi aktif dari berbagai pihak ini akan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi perubahan positif di dalam rutan.

Penyelesaian konflik kedaerahan di dalam rutan juga memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap budaya. Kegiatan-kegiatan yang mempromosikan dialog antarbudaya, seperti diskusi kelompok, seminar, dan kegiatan seni budaya, dapat menjadi sarana efektif untuk mengurangi stereotip dan prasangka antar kelompok narapidana. Dengan memahami dan menghargai perbedaan budaya, narapidana dapat belajar untuk hidup berdampingan dengan damai, sehingga potensi konflik dapat diminimalisir.

Selain itu, kebijakan internal rutan harus diimplementasikan dengan tegas namun adil. Aturan-aturan yang jelas dan konsisten mengenai perilaku yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan harus diterapkan. Sanksi bagi narapidana yang melanggar aturan harus ditegakkan tanpa pandang bulu untuk menciptakan rasa keadilan. Di sisi lain, penghargaan bagi narapidana yang menunjukkan perilaku baik juga penting untuk memotivasi mereka agar terus berperilaku positif.

Terakhir, melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap seluruh upaya yang telah dilakukan. Penilaian rutin terhadap efektivitas program keamanan, rehabilitasi, dan upaya kolaboratif harus dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tujuan telah tercapai dan area mana yang masih perlu diperbaiki. Dengan demikian, penyesuaian dan perbaikan dapat dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa konflik kelompok kedaerahan dapat diminimalisir dan keamanan di Rutan Kelas 1 Palembang dapat terus ditingkatkan. Secara keseluruhan, upaya pencegahan konflik kelompok kedaerahan dan peningkatan keamanan di Rutan Kelas 1 Palembang memerlukan sinergi antara penguatan sistem keamanan, pemberdayaan program rehabilitasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kolaborasi dengan pihak eksternal. Dengan pendekatan yang komprehensif dan terpadu, diharapkan konflik dapat diminimalisir dan lingkungan yang aman serta rehabilitatif dapat tercipta di dalam rutan.

Kesimpulan

Kesimpulannya adalah konflik antar kelompok kedaerahan di Rutan Kelas 1 Palembang dipicu oleh berbagai faktor kompleks seperti persaingan untuk menguasai sumber daya terbatas, ketidakadilan dalam distribusi fasilitas, perbedaan kultural dan etnis, serta dinamika politik internal kelompok. Kondisi lingkungan yang tertekan di dalam rutan, kurangnya program resolusi konflik yang efektif, dan pengaruh eksternal dari kelompok kriminal juga berkontribusi terhadap terjadinya konflik. Untuk mencegah dan mengatasi konflik ini serta meningkatkan keamanan, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan multidimensional. Langkah-langkah ini meliputi penguatan sistem keamanan dengan penambahan personel dan teknologi pengawasan, pemberdayaan narapidana melalui program rehabilitasi dan pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan petugas, dan kolaborasi dengan pihak eksternal seperti pemerintah daerah dan LSM. Pendekatan sensitif terhadap budaya dan kebijakan internal yang tegas namun adil juga diperlukan. Dengan evaluasi dan monitoring berkala, diharapkan konflik dapat diminimalisir dan tercipta lingkungan yang aman serta rehabilitatif di dalam Rutan Kelas 1 Palembang.

Daftar Pustaka

Adhani, Y. (2014). Konsep Pendidikan Multikultural Sebagai Sarana Alternatif Pencegahan Konflik. *SOSIO-DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 1(1), 111-121.



- Adibah, I. Z. (2014). Pendidikan Multikultural sebagai Wahana Pembentukan Karakter. *Madaniyah*, 4(2).
- Fernandes, I., & Jarodi, O. (2023). Manajemen Konflik dalam Penanganan Konflik Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 12(02).
- Hutagaol, T. N. D., Wahyudi, B., & Tirto, D. (2022). POTENSI KONFLIK NON-REALISTIS DALAM KONFLIK ANTAR KELOMPOK ORGANISASI DAERAH (ORGANDA) MAHASISWA DI KOTA MAKASSAR. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11(3).
- Kusumawardani, S. T. (2020). Sistem Manajemen Penanganan Konflik Sosial. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*, 4(Special 4), 978-988.
- Lumi, H. (2015). Peranan Pemerintah Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Konflik Antar Kelompok (Suatu Study Di Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado). *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 2(6), 1117.
- Mustar, M., Purba, D. W., Supriadi, M. N., Kusumadewi, Y., Sutrisno, E., Juliana, J., ... & Tamrin, A. F. (2020). *Ilmu Sosial Budaya Dasar*.
- Nur Hidayat. (2017). Pola Kuasi-Solidaritas Sosial Pada Komunitas Podjok (Paguyuban Onthel Djokjakarta). Skripsi UIN Sunan Kalijaga.
- Rofiqi, M. A., & Rahim, R. A. A. (2023). Pencegahan Konflik dan Upaya Membangun Perdamaian. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 3(1), 181-186.
- Somantri, G. R. (2005). Memahami metode kualitatif. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 9(2), 57-65.
- Uci Zahrafani, dkk. (2017). Upaya Pemerintah Dalam Menangani Konflik Antar Suku di Kabupaten Kutai Timur. *Journal Ilmu Pemerintahan*, Volume 5, Nomor 4, 2017: 1585-1598.
- Wiratama, R. A. (2021). Implementasi Manajemen Security Dalam Mencegah Terjadinya Konflik Antar Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. *Widya Yuridika*, 4(1), 295-306.
- Yayasan Kita Menulis.